

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

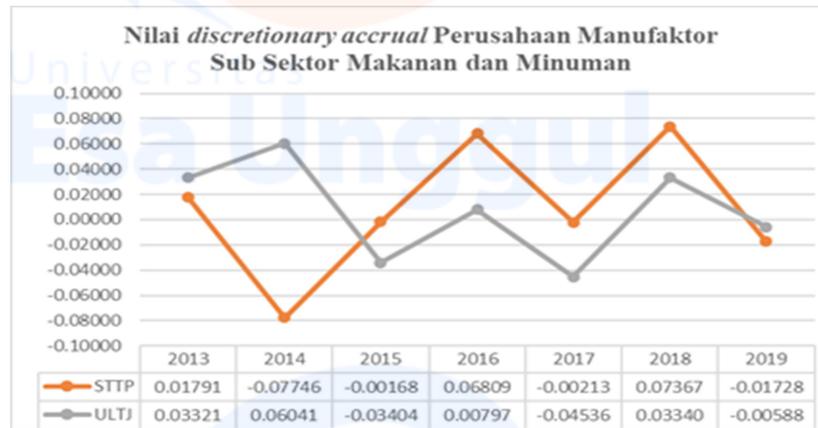
Menurut Pricilia and Susanto (2017)[1], laporan keuangan seringkali disalahgunakan oleh manajemen dengan melakukan perubahan dalam penggunaan metode akuntansi, sehingga akan mempengaruhi jumlah laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso et al., 2015)[2].

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan. Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, dan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Peraturan tentang pelaporan keuangan dan akuntansi telah memberikan peluang untuk melakukan manajemen laba, contohnya seperti fleksibilitas tentang beberapa metode akuntansi yang berbeda. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau prestasi manajemen.

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Tindakan campur tangan manajemen terhadap laporan keuangan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan. Manajemen laba bisa juga mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, manajemen laba mengakibatkan investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Secara umum manajemen laba (earnings management) didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Gustinya, SE., M.Ak., 2016)[3]. Sedangkan menurut Lo (2012)[4] mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi atau campur tangan dengan maksud tertentu terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pribadi.

Berikut ini disajikan data *discretionary accrual* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 –2019:



Gambar 1.1
Discretionary Accrual

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bentuk manajemen laba yang dilakukan PT. Siantar Top Tbk. dengan kode (STTP) yaitu *income minimization* (menurunkan laba) untuk meminimumkan pajak karena nilai *discretionary accrual* nya negatif dalam 4 tahun yaitu pada tahun 2014 nilai *discretionary accrual* -0,07746 kemudian menurun pada tahun 2015 dengan nilai *discretionary accrual* -0,00168 dan menurun kembali pada tahun 2017 dengan nilai *discretionary accrual* -0,00213 dan pada tahun 2019 dengan nilai *discretionary accrual* -0,01728. Dan PT. Siantar Top Tbk juga melakukan bentuk manajemen laba dengan *income maximization* (memaksimalkan laba) dalam 3 tahun yaitu pada tahun 2013 dengan nilai *discretionary accrual* 0,01791 dan pada tahun 2016 dengan nilai *discretionary accrual* 0,06809 lalu nilai *discretionary accrual* kembali naik pada tahun 2018 menjadi 0,07367.

Bentuk manajemen laba yang dilakukan PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. dengan kode (ULTJ) yaitu *income maximization* (memaksimalkan laba) yaitu pada tahun 2013 dengan nilai *discretionary accrual* 0,03321 dan pada tahun 2014 dengan nilai *discretionary accrual* 0,06041 lalu kemudian turun pada tahun 2016 menjadi nilai *discretionary accrual* 0,00797 dan naik pada tahun 2018 menjadi nilai *discretionary accrual* 0,03340. Dan PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. juga melakukan *income minimization* (menurunkan laba) untuk meminimumkan pajak yaitu pada tahun 2015 dengan nilai *discretionary accrual* -0,03404 dan tahun 2017 nilai *discretionary accrual*

menjadi -0,04536 lalu kemudian nilai *discretionary accrual* turun pada tahun 2019 menjadi -0,00588.

Kasus diatas merupakan contohpelaporan manajemen laba yang dilakukanoleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengelabui para *stakeholder* tetapi juga terhadap negara yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan.Tindakan manajemen laba dilakukan agar laporan keuangan perusahaan selalu terlihat.Berdasarkan kasus tersebut telah menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan untuk meminimalkan manajemen laba. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen dapat diminimalkan dengan mekanisme monitoring yang mampu menyeimbangkan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham maupun pihak lainnya yaitu dengan cara menerapkan tata kelola yang baik diperusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.*Good Corporate Governance* merupakan prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha (Negara, 2011)[5].

Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat memaksimalkan nilai perseroan bagi perseroan tersebut dan bagi pemegang saham(Supardi & Setyapurnama, 2020)[6]. Di Indonesia, permasalahan tata kelola (*corporate governance*) menimbulkan beberapa skandal dalam dunia bisnis diantaranya yaitu : Bank Mega bersama dengan PT. Elnusa tahun 2010, melakukan pembobolan dana nasabah deposito sebesar Rp 111 Milyar yang dilakukan oleh 6 tersangka yang juga karyawan perusahaan Bank Mega dan PT. Elnusa. Ditahun 2011 pada Citibank, Kasus pembobolan dana Rp 17 Milyar oleh senior Manager Citibank dengan cara mentransfer uang tersebut ke sebuahperusahaan dirinya serta dibantu oleh teller.

Sinar Mas Group pada tahun 2014, berdasarkan laporan masyarakat serta hasil audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dilaporkan tahun lalu, WALHI mensinyalir terdapat penyelewengan pajak dana reboisasi dari lahan seluas 2.000 hektar yang dikelola oleh Sinar Mas Group, Lahan itu diduga kuat dikelola tanpa mengantongi izin konsesi.Dari kasus ini Sinar Mas Group melalui tiga anak perusahaannya merugikan kas Negara sebesar Rp 181,7 Milyar.

Terlihat sekali disini bahwa perusahaan-perusahaan raksasa pun dapat tumbang yang salah satu faktornya adalah lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG dan terkait persoalan moral dan etika yang kurang baik, lemahnya dalam tata cara kelola perusahaan yang tidak efisien, efektif, ekonomis, dan produktif tanpa mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders serta penegakkan hukum yang lemah. Hal ini juga dikarenakan semakin terpisahnya hubungan antara principal dengan agent yang kurangnya transparan perusahaan dalam pelaporan kinerja perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* ditandaidengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan komisaris independen. Pertama, kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai *sophisticated* investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adanya kemampuan profesional dalam menganalisis informasi sehingga keandalan informasi dapat dipertanggung jawabkan serta memberikan motivasi yang kuat dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas operasional perusahaan (Noviawan & Septiani, 2013) [7].

Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Secara singkat dapat dikatakan kepemilikan institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan terjadi manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat control eksternal terhadap perusahaan. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Shierly Pricillia dan Liana Susanto (2017) variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Pramesty (2017) variabel konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berikut ini disajikan data kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016 –2019:

Tabel 1.1
Data Kepemilikan Institusional Perusahaan Manufaktur Sektor
Makanan Dan Minuman di BEI 2016 - 2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	63.04	62.38	38.30	38.54
2	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	92.01	92.01	92.01	92.01
3	MYOR	Mayora Indah Tbk	59.07	59.07	59.07	59.07
4	B STTP	PT Siantar Top Tbk	56.76	56.76	56.76	56.76
5	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	37.09	36.86	36.29	36.38

dasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada tiga perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang sama dalam periode 2016 - 2019 yaitu PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Mayora Indah Tbk, dan PT. Siantar Top Tbk. Sedangkan untuk 2 perusahaan lainnya yaitu Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Ultra Jaya Milk Industry Tbk, memiliki kepemilikan institusional yang berbeda dari tahun 2016 – 2019.

Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen (Purwaningtyas 2011)[8]. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusumawardhani yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian SARI (2016)[9] menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berikut ini disajikan data kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016 –2019:

Tabel 1.2
Data Kepemilikan Manajerial Perusahaan Manufaktur Sektor
Makanan dan Minuman di BEI 2016 - 2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0.00	0.00	0.01	0.01
2	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	0.76	0.76	0.76	0.00
3	MYOR	Mayora Indah Tbk	25.22	25.22	25.22	25.22
4	STTP	PT Siantar Top Tbk	3.19	3.19	3.26	3.26
5	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	11.49	33.84	34.34	36.01

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada perusahaan Mayora Indah Tbk dalam waktu 4 tahun tidak mengalami kenaikan atau penurunan kepemilikan manajerial yaitu besarnya tetap sama 25.22. Pada perusahaan

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT. Siantar Top Tbk, kepemilikan manajerialnya tetap sama pada tahun 2016 – 2017 dan 2 perusahaan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018. Sedangkan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, pada 2016 – 2018 tidak mengalami kenaikan yaitu tetap pada angka 0,76 dan ditahun 2019 perusahaan tersebut mengalami penurunan sampai tidak memiliki kepemilikan manajerial. Lain hal pada perusahaan Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terus mengalami kenaikan kepemilikan manajerial di setiap tahunnya.

Selain kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, ada komiteaudit. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara professional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Keberadaan komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajer.

Keberadaan Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit sehingga akan mencegah terjadinya manajemen laba.

Penelitian Riza Noor Rachamawati (2015) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan pada manajemen laba. Namun hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian Cahyani Dewi Anggraeni (2017), komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berikut adalah jumlah anggota dewan komite audit yang ada pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019 :

Tabel 1.3
Data Jumlah Komite Audit Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman DI BEI 2016 - 2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	4	4	0	0
2	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	3	3	3	3
3	MYOR	Mayora Indah Tbk	3	3	3	3
4	BSTTP	PT Siantar Top Tbk	3	3	3	3
5	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	3	3	3	3

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa perusahaan mempunyai jumlah komite audit rata-rata berjumlah 3 (tiga) orang. Berdasarkan peraturan OJK nomor 26/POJK.04/2017 menerangkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3(tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Sedangkan dari data tabel diatas masih ada 1 perusahaan yang tidak memiliki komite audit yaitu terjadi pada perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2018 dan 2019.

Hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK juga menandakan adanya indikasi akan terjadinya praktik manajemen laba karena semakin banyak jumlah komite audit maka akan mengurangi praktik manajemen laba. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Husni (2013) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin tinggi ukuran komite audit maka akan mengurangi praktik manajemen laba. Komite audit akan menghambat manajer dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga praktik manajemen laba dapat diminimalisir.

Selain komite audit ada komisaris independen yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Komisaris Independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak – pihak yang terkait dalam perusahaan. Dengan demikian komisaris ini dapat mewakili prinsip *corporate governance* : *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Diharapkan dengan adanya komisaris independen dapat membantu pemegang saham dalam mengawasi kinerja manajemen untuk mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan melalui praktik manajemen laba.

Terkait dengan jumlah atau proporsi Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan tersebut, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Robert Jao and Gagaring Pagalung (2011)[10] menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan pada perusahaan sehingga dapat meminimalkan kemungkinan manajer dalam melakukan manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Wulan Pramesty (2017) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berikut ini data jumlah anggota komisaris independen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019 :

Tabel 1.4
Data Jumlah Anggota Komisaris Independen Perusahaan Manufaktur
Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2016 - 2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	1	1	1	0
2	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	2	2	2	2
3	MYOR	Mayora Indah Tbk	2	2	0	0
4	STTP	PT Siantar Top Tbk	0	0	0	0
5	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	1	1	1	2

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tidak mengalami kenaikan atau penurunan anggota komisaris independen. Sedangkan beberapa perusahaan lainnya dalam 3 tahun mengalami kenaikan dan penurunan anggota komisaris independen. Lain halnya dengan PT Siantar Top Tbk yang tidak memiliki anggota dewan komisaris independen. Tingginya jumlah komisaris independen dapat disebabkan tingginya kebutuhan perusahaan atau adanya kebijakan perusahaan dalam menambah jumlah komisaris independen untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Rendahnya jumlah komisaris

independen dapat disebabkan rendahnya kebutuhan perusahaan atau adanya kebijakan perusahaan dalam mengurangi jumlah komisaris independen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba adalah kualitas audit. Kualitas audit merupakan sebuah hal yang tidak dapat dikuantifisir secara langsung. De Angelo (1981)^[11] mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan dimana seorang auditor menemukan tentang adanya kesalahan dan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan tersebut menurutnya tergantung dari kemampuan teknis dan independensi dari auditor. Auditor dapat membatasi praktik manajemen laba serta membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan. Namun, efektifitas dan kemampuan auditor untuk mendeteksi manajemen laba tergantung kepada kualitas laporan audit yang mereka hasilkan. Kualitas audit ini sering dihubungkan dengan ukuran dari kantor publik yaitu KAP (*Big Four* dan *Non Big Four*).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi proksi atau indikator utama dalam menilai kualitas audit. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh sebagian besar penelitian – penelitian auditing yang menyimpulkan bahwa kualitas audit dari KAP *The Big Four* lebih bagus daripada KAP *non The Big Four*. Rusmin (2010)^[12] menyatakan bahwa tindakan manajemen laba terhadap hasil audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* lebih rendah daripada KAP *non The Big Four*. Perbedaan kualitas audit tersebut dapat berdampak pada pendeteksian manajemen laba. Oleh karena itu, audit berkualitas tinggi (*high-quality auditing*) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif dan memiliki kemampuan teknis dalam menemukan pelanggaran akuntansi sebuah perusahaan. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Indriastuti (2012)^[13] yang menyatakan kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hal ini disebabkan karena, selain KAP *The Big Four* memiliki kemampuan dalam meminimalisir tindakan manajemen laba, auditor besar tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya malah menambah tindakan manajemen laba. Banyak penelitian yang berkesimpulan kualitas audit tidak ditentukan oleh ukuran KAP. KAP *The Big Four* dan KAP *Non The Big Four* dinilai tidak memiliki perbedaan kualitas audit yang signifikan.

Beberapa argument yang coba dibangun, pertama KAP *The Big Four* dan KAP *Non The Big Four* berada dalam standar dan peraturan kerja yang sama sehingga kedua kelompok KAP akan berusaha sejalan dengan standar dan peraturan tersebut. Kedua, KAP *Non The Big Four* memiliki pengetahuan yang lebih dalam akan keadaan domestik yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi lebih awal segala bentuk ketidakwajaran. Tentu

saja argumen ini kembali dapat diperdebatkan dengan menimbang kedekatan auditor dengan klien dapat memunculkan isu independensi auditor dan berakibat pada kualitas audit.

Ketiga, ukuran KAP yang lebih kecil memaksa auditor *Non The Big Four* untuk melakukan usaha yang lebih besar dalam melakukan proses audit guna meminimalkan risiko audit yang akan muncul akibat tidak mampu membeli asuransi secara menyeluruh untuk melindungi mereka. Alasan terakhir yang menguatkan argumen tentang kesetaraan kualitas audit adalah tingkat perputaran auditor (*CPAs*) antara KAP *The Big Four* dan KAP *Non The Big Four* yang tinggi, sehingga alasan bahwa auditor *The Big Four* memiliki kemampuan yang lebih baik tidak sepenuhnya benar. Argumen - argumen ini yang kemudian memunculkan kembali isu apakah kualitas audit KAP *The Big Four* lebih superior daripada KAP *Non The Big Four*.

Melihat pentingnya penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan pentingnya peran auditor dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan, memberikan motivasi untuk melaksanakan penelitian yang dapat mendeteksi pengaruh dari tata kelola perusahaan yang baik dan peranan auditor dalam mengaudit laporan keuangan terhadap kecenderungan dilakukannya manajemen laba. Alasan penulis memilih industri makanan dan minuman sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan pertumbuhan nilai pada sektor industri makanan dan minuman ini lebih stabil karena didorong oleh volume penjualan dan tidak terpengaruh oleh musim ataupun perubahan kondisi perekonomian misalnya inflasi.

Walaupun terjadi krisis ekonomi, kelancaran produksi industri makanan dan minuman masih terjamin karena dalam kondisi apapun konsumen tetap membutuhkan produk makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar tetapi kenyataannya masih banyak yang melakukan praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tersebut oleh karena itu penelitian ini mengambil industri subsektor makanan dan minuman.

Motivasi peneliti dalam penelitian ini mengenai manajemen laba menjadi semakin penting karena tiga alasan. Pertama, usia pasar modal Indonesia yang masih relatif muda sudah tentu masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, khususnya pada peraturan - peraturan. Untuk itu berbagai penelitian masih diperlukan sebagai bahan masukan bagi pembuat peraturan agar peraturan yang dibuat tersebut efektif. Kedua, sebagaimana yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu, tindakan manajemen laba apapun alasan dan penyebabnya biasanya merugikan

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan khususnya investor karena disklosur dalam laporan keuangan menjadi tidak memadai untuk pengambilan keputusan.

Ketiga, adanya riset *gap* bahwa hasil penelitian tidak konsisten sehingga perlu diteliti kembali. Oleh karena itu, jika perataan laba terdapat pada perusahaan publik di Indonesia, maka praktik itu akan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi pihak - pihak yang berkepentingan. Dan adanya keinginan dari penulis untuk menerapkan dan mensosialisasikan terkait dengan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga laporan keuangan menjadi transparan dan tidak mengandung unsur manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, antara lain:

1. Banyak perusahaan melakukan praktik manajemen laba bertujuan untuk menarik investor karena pada umumnya para investor lebih memperhatikan laba perusahaan.
2. Terdapat mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan sektor makanan dan minuman yang sudah memenuhi syarat dari peraturan BEI sebagai pengelolaan perusahaan tetapi tidak diterapkan dengan baik sehingga terjadi praktik manajemen laba.
3. Terdapat perbedaan kepentingan antara principal (pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen).
4. Masih ada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang masih kekurangan anggota komisaris independen yang jumlahnya tidak sesuai dengan peraturan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini mengingat terbatasnya data dan informasi yang didapatkan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah-masalah yang ada diantaranya :

1. Penelitian ini membatasi lingkup penelitiannya pada *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit sebagai variabel independen (x) dan manajemen laba sebagai variabel dependen (y).

2. *Good Corporate Governance* diukur dengan proksi ukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen.
3. Penelitian ini berfokus untuk penelitian pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 –2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 –2019?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* (ukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen) dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2019. Sedangkan secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan kualitas

audit secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor
Meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba pada suatu perusahaan, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai acuan investor dalam mengambil keputusan.
2. Bagi Perusahaan
Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur tentang manajemen laba sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.